

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan pertanggungjawaban institusi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 ini disampaikan dengan harapan adanya saran maupun tanggapan untuk penyempurnaan Laporan Kinerja ini, dan akan kami pertimbangkan untuk penyempurnaannya.

Pelaihari,       Februari 2022  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Tanah Laut

**EKO TRIANTO, S.Sos**  
Pembina Tk. I (IV/B)  
NIP. 19670601 199401 1 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut menyajikan capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan sasaran strategis selama tahun 2021 yang sepenuhnya mengacu pada rencana startegis Tahun 2018-2023 dan berbagai capaian startegis tercermin juga dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja.

Untuk tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut menetapkan 10 sasaran stategis dengan 12 indikator. Selanjutnya dari sasaran dan indikator tersebut didukung dengan 4 program dan 14 kegiatan dan 45 sub kegiatan secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2021 dapat memenuhi target sesuai yang diharapkan. Berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas, daan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut, secara keseluruhan keberhasilan program-program kami sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Dinas Sosial baik PNS dan Non PNS, Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan stakeholder.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan yang dapat memberikan informasi untuk pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Bangsa Indonesia pada saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis dan dinamis yang mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugastugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigm pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi seimbang antara Pemerintah, Swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip dasar antara lain adanya transparasi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari good governance dapat dirasakan oleh pihak-pihak terkait hal ini akan memudahkan Institusi Pemerintah melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, mensyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah didalamnya. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sementara itu, penerapan di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut salah satunya didukung oleh Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0106 Tahun 2017 tentang Petunjuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP ) Dinas Sosial Tahun 2021

Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut LAKIP disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yang pada pelaksanaannya telah dilengkapi dengan penandatanganan perjanjian kinerja dari eselon II hingga Staf, pengukuran kinerja triwulan yang juga telah diinput di aplikasi E-SAKIP serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dari eselon II hingga Eselon IV.

## **B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut merupakan dinas teknis daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi :

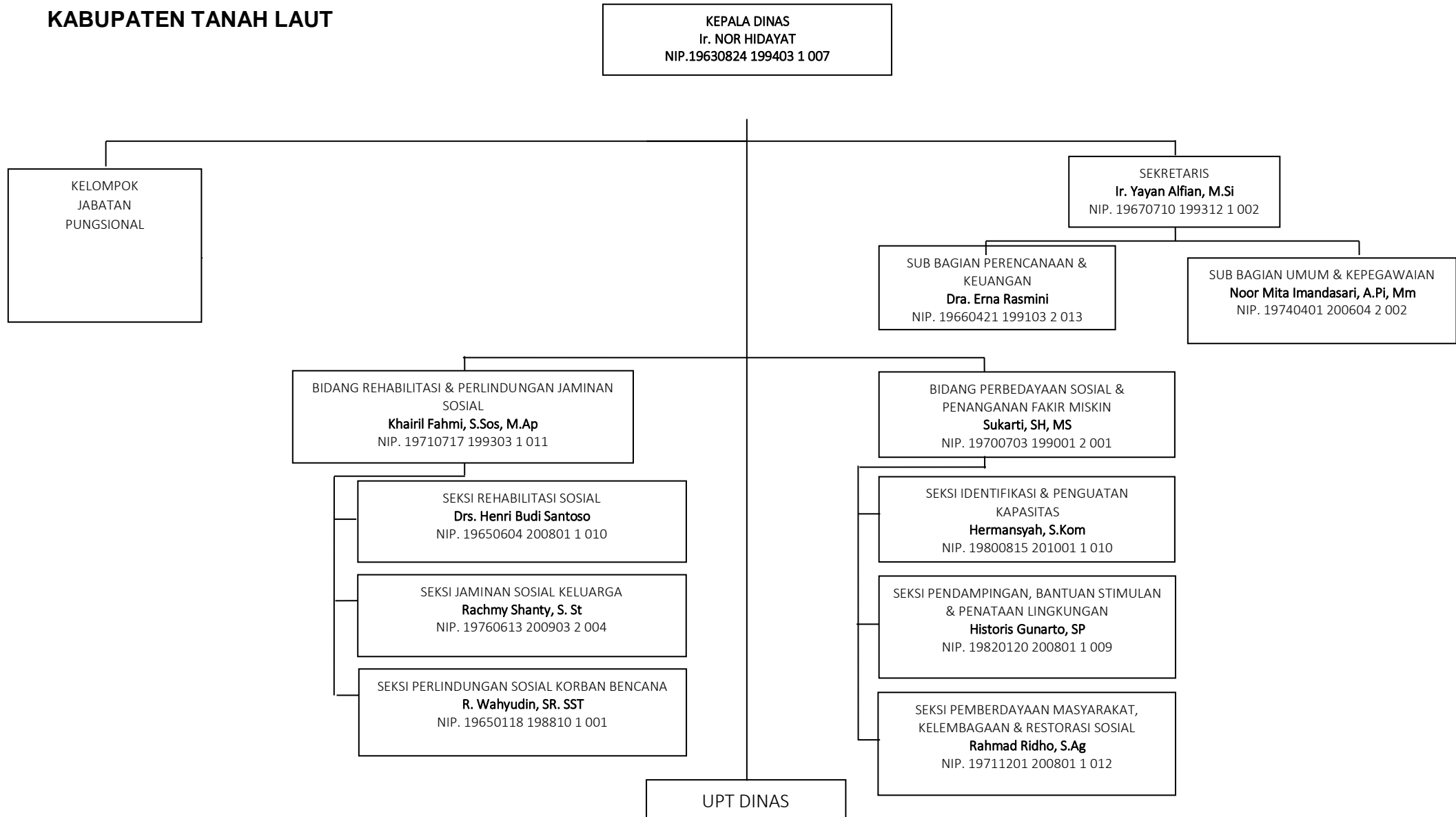
- 1) perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas;
- 5) pembinaan UPT Dinas; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan komposisi sebagai berikut :

### Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut

NO	Status Kepegawaian	Gol/ Ruang	Kadis	Sekretariat	Bid.Pembd Sos & Pengn FakMis	Bid.Rehab & PrInd JamSos
1	P N S	27				
	Pembina Utama Muda	(IV/c)	1	-	-	-
-	Pembina Tk.I	-		1	-	-
	Pembina	-		-	-	-
	Penata Tingkat I	III/d		2	1	1
	Penata	III/c		-	2	2
	Penata Muda Tk.I	III/b		1	-	-
	Penata Muda	III/a		1	2	-
	Pengatur Tk.I	II/d		-	-	-
	Pengatur	II/c		3	1	2
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b		1	-	-
	Pengatur Muda	II/a		-	1	-
	Juru Tingkat I	I/d		2	-	-
	Juru	I/c		-	-	-
	Juru Muda Tk I	I/b		-	-	-
	Juru Muda	I/a		-	-	-
2	Honorer Daerah	-	-	-	-	-
3	PTT/Sukwan/Kontrak	PTT	-	10	3	3

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TANAH LAUT**



### **Penjelasan Bagan :**

Struktur Organisasi SKPD ditunjuk untuk menunjukkan Organisasi, jumlah personil dan Tata laksana Dinas Sosial untuk menjalankan tugas yang telah dibebankan Dinas Sosial dibantu oleh satu Sekretariat dan dua Bidang yang terdiri dari :

1. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial.
  - a. Seksi Rehabilitasi Sosial
  - b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
  - c. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
3. Bidang Pemberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin
  - a. Seksi Identifikasi dan penguatan kapasitas
  - b. Seksi perlindungan bantuan stimulant dan penataan lingkungan
  - c. Seksi Pemberdayaan masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi sosial.

### **C. Isu Strategis**

Pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial masih dibayangi oleh kecendrungan semakin meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kondisi ini merupakan tantangan yang sangat berat, jika tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial yang semakin meluas dan berimplikasi pada lemahnya ketahanan sosial serta dapat menimbulkan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat. Isu Strategis Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan pada RPJMD tahun 2018-2023 dan evaluasi capaian pembangunan kesejahteraan sosial yang patut mendapat perhatian antara lain :

1. Jangkauan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) masih terbatas sehingga belum mampu menjangkau mereka yang tinggal di daerah pedesaan secara merata.

2. Belum tersedianya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Fakir Miksin dan Orang Tidak Mampu yang valid dan akurat.
3. Usaha pembangunan kesejahteraan sosial belum mampu mencapai seluruh aspek Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS).
4. Keterbatasan dana dan peralatan penanggulangan bencana.
5. Terbatasnya pekerja sosial profesional yang mampu dalam melaksanakan tugas penanganan masalah kesejahteraan sosial.
6. Pelayanan terhadap penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi kedisabilitas, kerawanan, keterlantaran, kemiskinan dan penanggulangan bencana belum optimal.
7. Kelembagaan sosial belum tersedia dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan.
8. Organisasi sosial dan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum berperan dengan baik/ optimal.
9. Masih terbatasnya akses penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar.
10. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya kesadaran/ pemahaman masyarakat dalam gerakan kesetiakawanan sosial.
11. Belum optimalnya implementasi berbagai kebijakan dan peraturan daerah terkait dengan penanganan PMKS, lemahnya pengawasan dan pendampingan terhadap PMKS yang berada di desa-desa.
12. Keberadaan PMKS di Kabupaten Tanah Laut juga tidak terlepas dari kurang optimalnya penanganan serta kepedulian anggota keluarga atau kerabat terhadap PMKS sehingga tidak jarang terdapat PMKS yang menolak untuk kembali ke keluarga atau diterlantarkan oleh keluarganya sendiri.

#### **D. Produk dan Layanan**

Produk Layanan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut mengacu pada Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yaitu : ***Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)***, dan ***visi Dinas Sosial Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)***, maka

dapat diuraikan produk dan layanan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Sasaran	Pelayanan yang diberikan	Penanggungjawab
1	Rehabilitasi Sosial	- Penyandang Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang disabilitas</li> <li>- Pemenuhan kebutuhan dasar</li> <li>- Konseling</li> <li>- Pendampingan sosial</li> <li>- Layanan rujukan</li> </ul>	Seksi rehabilitasi Sosial
		- Lanjut Usia Terlantar	Pemenuhan kebutuhan dasar	Seksi rehabilitasi Sosial
		- Keluarga bermasalah psikologis	Konseling Keluarga	Seksi rehabilitasi Sosial
		- Korban tidak kekerasan	Konseling	Seksi rehabilitasi Sosial
		- Wanita Rawan Sosial ekonomi (WRSE)	Pendidikan Pelatihan dan pendampingan	Seksi rehabilitasi Sosial
		- Gelandangan pengemis dan orang terlantar	Bimbingan Mental, spiritual, Rujukan, pendampingan	Seksi rehabilitasi Sosial

			dan Reunifikasi keluarga	
		- Anak berhadapan dengan hukum	Pendampingan	Seksi rehabilitasi Sosial
2	Layanan Kedaruratan	- Orang terlantar, eks Narapidana, ODGJ dan Mayat Terlantar	Rujukan, Reunifikasi Keluarga, Pemenuhan Kebutuhan Pangan, Sandang.	Seksi rehabilitasi Sosial
3	Perlindungan Sosial	- Korban Bencana Alam dan Sosial	Bantuan Logistik, Dapur umum, Pengungsian dan pendampingan Sosial	Seksi Perlindungan Sosial korban Bencana
4	Bantuan Sosial	- Lansia Terlantar - Fakir Miskin - Penyandang Disabilitas Berat - Korban Bencana Alam dan Sosial	Bantuan Sosial dalam bentuk barang, bantuan sosial uang, bantuan sosial langsung Tunai (BLT), fasilitasi bantuan sosial tidak terencana, santunan bagi korban Covid-19 yang meninggal.	Seksi Perlindungan Sosial korban Bencana
5	Jaminan Sosial	- Keluarga sangat miskin	Pemenuhan kebutuhan dasar	Seksi Jaminan Sosial Keluarga

		- Lanjut Usia Non Potensial	Pemenuhan kebutuhan dasar	Seksi Jaminan Sosial Keluarga
		- Penyandang Disabilitas Berat	Pemenuhan kebutuhan dasar	Seksi Jaminan Sosial Keluarga
		- Anak Terlantar	- Pendataan - Penjangkauan - pemantauan	Seksi Jaminan Sosial Keluarga
6	Pemberdayaan Sosial	- Keluarga Miskin	Bantuan Stimulan, Pendampingan  Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Seksi Pendampingan, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
		- Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Pembinaan, bimbingan Teknis dan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial
		- Taman Makam Pahlawan dan Situs Perjuangan	Pemeliharaan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial
7	Pengumpulan dan Pengolahan Data	- Keluarga Miskin, PMKS, Peserta Jaminan Kesehatan, KPM Penerima Bantuan Sosial	Pendataan PMKS, Pengelolaan Data Kemiskinan, Verifikasi dan Validasi Data	Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

### E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. KATA PENGANTAR
2. IKHTISAR EKSEKUTIF
3. DAFTAR ISI

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

#### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja
- F. Program dan Kegiatan

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD
2. Eselon II (Kepala Dinas)
3. Eselon III (Sekretaris)
  - 1) Eselon IV (Kasubbag)
4. Eselon III (Kepala Bidang)
  - 1) Eselon IV (Kepala Seksi)

##### B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2021
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021

#### BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

#### LAMPIRAN :

1. IKU

2. Pernyataan Hasil Reviu Tahun 2020
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 bertandatangan
4. Cascading/Pohon Kinerja
5. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023, maka Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati :

#### **A. Visi RPJMD**

**“Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi (“Berkarya, Inovasi, Tertata, Relijius, Aktual, Sinergi”)**

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut sebagai organisasi perlu mengembangkan peluang dan inovasi, meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan.

#### **B. Misi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut memegang Misi ke 5 yaitu :

***“Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.***

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut tercantum dalam **Tujuan 1 yaitu : Meningkatnya kesejahteraan sosial dengan indikator Angka kemiskinan.**

*Sasaran RPJMD : Meningkatnya perlindungan masyarakat,*  
dengan indikator :

1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi Mandiri

2. Ketersediaan Basis Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan (%)
3. Persentase PMKS yang tertangani
4. Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi lainnya.

### **C. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan atau dihasilkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan strategis ini dapat menjadi sarana bagi Dinas Sosial untuk secara cepat dan tepat mengetahui apa yang harus segera diwujudkan oleh segenap jajaran Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis Dinas Sosial kepada Bupati Tanah Laut atas capaian kinerja untuk indikator-indikator sebagaimana tertuang dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Sosial Tahun 2021. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga diharapkan dapat dijadikan sarana bagi Bagian-Bagian di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan pengukuran sejauh mana kegiatan yang dilakukan telah memberikan akses terhadap pencapaian visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan.

Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah :

1. Terwujudnya taraf kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Terwujudnya partisipasi sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Terwujudnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana
4. Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien

Didasarkan kepada analisa kondisi umum lingkungan dan ruang Kabupaten Tanah Laut serta hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan periode sebelumnya, dapat diidentifikasi berbagai

permasalahan, kekuatan, peluang, tantangan, dan ancaman dalam pelayanan bidang sosial ke depan.

Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya penanganan masalah sosial bagi PMKS
2. Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Meningkatnya Pemberdayaan PMKS
4. Meningkatnya Ketersediaan Basis Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan yang akurat.
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS
6. Meningkatnya kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
7. Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa
8. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD
9. Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana tabel berikut :

No.	Tujuan	Indikator	Target	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
1	Terwujudnya taraf kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meningkat taraf kesejahteraan sosialnya	10%	Meningkatnya penanganan masalah sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	100%
			20%	Menurunnya angka Penyandang	Persentase menurunnya Penyandang	25%

				Masalah Kesejahteraan Sosial	Masalah Kesejahteraan Sosial	
			40%	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS	Persentase Keluarga Miskin yang meningkat kualitas hidupnya	45%
			15%		Persentase Penyandang Disabilitas yang mandiri	20%
			70%		Persentase Keluarga miskin yang mengembangkan usaha ekonomis produkti (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	80%
			100%	Meningkatnya Ketersediaan Basis Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan yang akurat.	Persentase data PMKS dan Kemiskinan yang terverifikasi dan tervalidasi	100%
			80%	Meningkatnya Kualitas	Persentase Lanjut usia	90%

				Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS	yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	
			80%		Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90%
			100%		Persentase anak terlantar yang mampu mengakses layanan pendidikan dan kesehatan	100%
			100%		Persentase Anak berhadapan dengan hukum yang mendapat pendampingan sosial	100%
			100%		Persentase orang terlantar, eks narapidana dan orang dengan gangguan jiwa yang ditangani	100%

2	Terwujudnya partisipasi sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	Meningkatnya kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%
3	Terwujudnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana	Persentase warga terdampak bencana yang mendapat bantuan sosial	100%	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana	100%
4	Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan yang tertib	BB	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	A
			BB		Nilai Hasil Evaluasi RB	A
			100%	Meningkatnya kelancaran	Persentase Pelayanan Administrasi	100%

				Administrasi Perkantoran	Perkantoran dengan baik dan Tepat Waktu	
			100%		Persentase pengelolaan Kepegawaian yang tertib	100%

No	Tujuan	Indikator	Target	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Kondisi kinerja awal RPJMD	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
							2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	12	13
1	Terwujudnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	10%	Meningkatnya Pelayanan dan penanganan masalah sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	31847	100	100	100	100	100	100
				Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		12,5	15	20	25	30	30

				Meningkatnya Pemberdayaan PMKS	Persentase Keluarga Miskin yang meningkat kualitas hidupnya	25	35	40	45	50	50
					Persentase Penyandang Disabilitas yang mandiri	5	10	15	20	25	25
					Persentase Keluarga miskin yang mengembangkan usaha ekonomis produkti (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	20	50	70	80	90	100

				Meningkatnya Ketersediaan Basis Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan yang akurat.	Persentase data PMKS dan Kemiskinan yang terverifikasi dan tervalidasi	100	100	100	100	100	100
				Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS	Persentase Lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	60	70	80	90	100	100
					Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	60	70	80	90	100	100

					Persentase anak terlantar yang mampu mengakses layanan pendidikan dan kesehatan	100	100	100	100	100	100
					Persentase Anak berhadapan dengan hukum yang mendapat pendampingan sosial	100	100	100	100	100	100
					Persentase orang terlantar, eks narapidana dan orang dengan	100	100	100	100	100	100

					gangguan jiwa yang ditangani							
2	Terwujudnya partisipasi sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100	Meningkatnya kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		100	100	100	100	100	100
3	Terwujudnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana	Persentase warga terdampak bencana yang mendapat bantuan sosial	100	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat		100	100	100	100	100	100

4	Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan yang tertib		Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD	dan setelah masa tanggap darurat bencana  Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		BB					
					Nilai Hasil Evaluasi RB	B		BB	A	A		
				Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik			100	100	100	100	

					dan Tepat Waktu							
					Persentase pengelolaan Kepegawaian yang tertib			100	100	100	100	100

#### D. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang digunakan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Selain itu, indikator kinerja utama digunakan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Kinerja Utama/ Tujuan. Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab
1	Meningkatnya Pelayanan dan penanganan masalah sosial bagi PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	$\sum \frac{PMKS \text{ yang mendapat pelayanan sosial}}{Populasi PMKS} \times 100$	Kepala Dinas
2	Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	$\sum \frac{PMKS (n-1) - PMKS \text{ tahun } (n)}{PMKS \text{ tahun } (n)} \times 100$	Kepala Dinas

## E. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang telah diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilita, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA DINAS SOSIAL**

**ESSELON II (KEPALA DINAS)**

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang tertangani (%)	90%
		Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	20 %

**ESSELON III (KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN)**

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kemandirian PMKS penerima Program UEP KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	100%
2	Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih dan terampil dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial	75%
3	Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100%

4	Meningkatnya Koordinasi antar SKPD tentang Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Sumbangan	Cakupan penerbitan Izin pengumpulan uang atau sumbangan yang dikeluarkan	100%
5	Meningkatnya Pengelolaan Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan	Ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan	75%

**ESSELON III (KEPALA BIDANG REHABILITASI PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL)**

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial	Persentase PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial	100%
2	Meningkatnya Kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	persentase lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%
		Persentase anak terlantar yang terpelihara	100%
3	Penanganan Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa	Persentase Korban bencana Alam dan Korban bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial	100%

**ESSELON III (SEKRETARIS)**

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4

1	Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Urusan Umum dan Kepegawaian SKPD	Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian	100%
2	Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	100%
3	Meningkatnya kelancaran Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB

#### **ESSELON IV (KEPALA SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENGUATAN KAPASITAS)**

<b>NO</b>	<b>KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4
1	Melaksanakan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Jumlah data fakir miskin dan data orang tidak mampu yang diverifikasi dan divalidasi	14000
2	Melaksanakan bimbingan dan pembinaan bagi petugas pendata dan operator data tingkat desa dan kecamatan	Jumlah operator data di desa dan di kecamatan yang terlatih dalam mengelola sistem informasi data	135
3	Mengelola Data PMKS	Jumlah PMKS yang diverifikasi dan di validasi	28000
4	Melaksanakan updating data secara berkala	Jumlah desa dan kelurahan yang melaksanakan updating data	135
5	Melaksanakan evaluasi pemanfaatan data	Jumlah pemanfatan DTKS oleh Instansi terkait	10

**ESSELON IV (KEPALA SEKSI PENDAMPINGAN BANTUAN STIMULAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN)**

<b>NO</b>	<b>KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4
1	Memfasilitasi Bantuan Stimulant dan Pendampingan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) KUBE bagi keluarga Fakir miskin	Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang mandiri setelah diberikan bantuan stimulant UEP KUBE	40
2	Melaksanakan pembinaan Pendamping Sosial Bantuan Pangan Kecamatan	Jumlah Pendamping Sosial Bantuan Pangan Kecamatan yang terampil dan kompeten	12
3	Melaksanakan pembinaan Pendamping UEP KUBE	Jumlah Pendamping UEP KUBE yang terampil dan kompeten	12

**ESSELON IV (KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELEMBAGAAN DAN RESTORASI SOSIAL)**

<b>NO</b>	<b>KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	3
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	Jumlah PSM Yang Terampil	22
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah TKSK yang Terampil	11
3	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber	Jumlah Penyuluh Sosial, Pendamping PKH, Petugas	138

	Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	SLRT, KT, dan Orsos yang Terampil	
4	Melaksanakan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	2
5	Melaksanakan Koordinasi Koordinasi antar SKPD tentang Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Sumbangan	Jumlah Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau sumbangan yang dikeluarkan	20

#### ESSELON IV (KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Memberikan/memfasilitasi pelatihan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar.	Jumlah anak terlantar yang mendapat pendidikan dan pelatihan	20
2	Memberikan/memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks trauma	Jumlah Penyandang disabilitas dan eks trauma yang mendapat pendidikan dan pelatihan kerja	20
3	Melaksanakan Pendampingan bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan Balita terlantar	Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan Anak Balita Terlantar yang terlindungi haknya setelah mendapat pendampingan sosial	15
4	Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi Eks Penyandang penyakit sosial	Jumlah Penyandang penyakit sosial yang terampil setelah mengikuti pelatihan keterampilan.	50

5	Memfasilitasi penanganan orang dengan gangguan kejiwaan, orang terlantar dan mayat terlantar	Jumlah orang dengan gangguan kejiwaan, orang terlantar dan mayat terlantar yang ditangani	40
---	--	---	----

#### ESSELON IV (KEPALA SEKSI JAMINAN SOSIAL KELUARGA)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mendistribusikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	3122
2	Melaksanakan Pemeliharaan bagi Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang di data	20
		Jumlah anak terlantar yang dikunjungi	20
		Jumlah anak terlantar yang di pantau	20

#### ESSELON IV (KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Memfasilitasi tempat pengungsian bagi korban terdampak bencana	Jumlah korban terdampak bencana yang difasilitasi ketempat pengungsian	70
2	Menyiapkan dan mendistribusikan bantuan tanggap darurat/logistic bagi korban bencana alam dan bencana sosial	Jumlah korban terdampak bencana yang mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat	70

3	Memfasilitasi pembinaan TAGANA dan Kampung Siaga bencana (KSB)	Jumlah TAGANA dan KSB yang terampil dalam penanggulangan bencana	42
4	Memfasilitasi Bantuan Sosial tidak terencana bagi korban bencana alam dan bencana sosial	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mandiri setelah mendapat bantuan sosial tidak terencana	400
5	Memberikan pelayanan dukungan psikososial bagi korban bencana alam/sosial	Jumlah Korban bencana alam/sosial yang mendapat dukungan psikososial	70

#### **ESSELON IV (KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN)**

<b>NO</b>	<b>KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4
1	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Kepegawaian SKPD	Jumlah dokumen Administrasi Barang SKPD	42
		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian SKPD	2
2	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD	Jumlah Jenis Administrasi Umum SKPD	4
3	Menyusun Data Kepegawaian, Evaluasi serta Administrasi Kepegawaian Dinas Sosial	Jumlah Jenis Jasa Administrasi Penunjang Umum SKPD	12
4	Melaksanakan peningkatan Kapasitas SDM	Jumlah Jenis Pengadaan Barang SKPD	4
		Jumlah Jenis Administrasi Pemeliharaan Barang SKPD	9

#### **ESSELON IV (KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN)**

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Melaksanakan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	3
2	Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	2
		Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	18
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	80

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2021	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya penanganan masalah sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	100%	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	Rp.5.330.000  Rp. 896.522.350



				dan Sosial Kabupaten/ Kota	
2	Menurunnya Angka PMKS	Persentase menurunnya PMKS	20%	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	<p>Rp.5.330.000</p> <p>Rp. 896.522.350</p>
				<b>Program Perlindungan Jaminan Sosial</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	<p>Rp. 864.999.259</p>
				<b>Program Rehabilitasi Sosial</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan</li> </ul>	<p>Rp. 4.080.539.510</p>

				<p>Pengemis di Luar Panti Sosial</p> <p><b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</li> </ul> <p><b>Program Penanganan Bencana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota</li> </ul>	<p>Rp. 92.329.000</p> <p>Rp. 1.201.584.930</p>
3	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS	Persentase Keluarga Miskin yang meningkat kualitas hidupnya		<p><b>Program Perlindungan Jaminan Sosial</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul> <p><b>Program Rehabilitasi Sosial</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta</li> </ul>	<p>Rp. 864.999.259</p> <p>Rp. 4.080.539.510</p>

				<p>Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</p> <p><b>Program Pemberdayaan Sosial</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	Rp. 896.522.350
4	Meningkatnya ketersediaan Basis Data Terpadu (BDT) PMKS dan Kemiskinan yang akurat	Persentase data PMKS dan kemiskinan yang terverifikasi dan tervalidasi		<p><b>Program Perlindungan Jaminan Sosial</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	Rp. 864.999.259
5	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS	Persentase Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		<p><b>Program Rehabilitasi Sosial</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan</li> </ul>	Rp. 4.080.539.510

				Pengemis di Luar Panti Sosial	
		Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		<b>Program Rehabilitasi Sosial</b> - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 4.080.539.510
		Persentase anak terlantar yang mampu mengakses layanan pendidikan dan kesehatan		<b>Program Perlindungan Jaminan Sosial</b> - Pemeliharaan Anak-anak terlantar	Rp. 92.329.000,-
		Persentase anak berhadapan dengan hukum yang mendapat pendampingan sosial		<b>Program Rehabilitasi Sosial</b> - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	Rp. 4.080.539.510

				serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
		Persentase orang terlanjar, eks narapidana dan ODGJ yang ditangani		<b>Program Rehabilitasi Sosial</b> - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 4.080.539.510
6	Meningkatnya kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		<b>Program Pemberdayaan Sosial</b> - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 896.522.350
7	Meningkatnya penanggulangan tanggap darurat	Persentase korban bencana alam dan sosial		<b>Program penanganan Bencana</b>	

	bencana dan kejadian luar biasa	yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setekah masa tanggap darurat bencana		- Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Rp. 1.201.584.930,-
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai Evaluasi SAKIP		<b>Program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota</b> - Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah - Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp. 99.214.640,-  Rp. 5.541.194.048
		Nilai Hasil Evaluasi RB		<b>Program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota</b> - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Administrasi	Rp. 569.168.121,-

				Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 56.377.000,-
				- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kabupaten/kota	Rp. 134.058.977,-
				- Pengadaan Barang Milik Daerah Kabupate/kota	Rp. 97.666.360,-
				- Perencanaan, Panganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 99.214.640,-
				- Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp. 5.541.194.048
9	Meningkatnya kelancaran Administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan tepat waktu		<b>Program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota</b>  - Administrasi Umum Perangkat Daerah  - Administrasi	Rp. 569.168.121,-

				Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 56.377.000,-
				- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kabupaten/kota	Rp. 134.058.977,-
				- Pengadaan Barang Milik Daerah Kabupate/kota	Rp. 97.666.360,-
		Persentase pengelolaan kepegawaian yang tertib		<b>Program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota</b>  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 56.377.000,-

**Program dan Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

Pelaksanaan rencana kerja Tahun 2021 secara umum telah terlaksana dengan baik. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tertuang dalam program dan kegiatan yang terdiri dari 6 program dan 14 kegiatan dan 45 Sub kegiatan. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut :

## Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
1 06 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>IKM</b>		<b>76,61</b>	<b>6.719.600.498</b>	<b>APBD</b>
1 06 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Sosial		1 Tahun	99.214.640	<b>APBD</b>
1 06 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	49.894.510	<b>APBD</b>
1 06 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA-SKPD	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	48 Dokumen	1.735.500	<b>APBD</b>
1 06 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya RKA Perubahan SKPD	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Dokumen	710.700	<b>APBD</b>

1 06 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA-SKPD	Kab. Tanah Laut, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	48 Dokumen	2.806.650	<b>APBD</b>
1 06 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersusunnya DPA Perubahan SKPD	Kab. Tanah Laut, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	20 Dokumen	2.035.440	<b>APBD</b>
1 06 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja	Kab. Tanah Laut, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	2 Dokumen	13.846.960	<b>APBD</b>
1 06 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Pameran	Kab. Tanah Laut, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	2 Kali event	28.184.880	<b>APBD</b>
<b>1 06 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>IKM</b>		76,61	5.541.194.0 48	<b>APBD</b>
1 06 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IKM	Kab. Tanah Laut, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	80	5.531.320.1 58	<b>APBD</b>

1 06 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<b>Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun</b>	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>1 Dokumen</b>	<b>6.213.090</b>	<b>APBD</b>
1 06 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Dokumen	3.660.800	<b>APBD</b>
<b>1 06 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian		1 Tahun	56.377.000	<b>APBD</b>
1 06 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110 stel	47.377.000	<b>APBD</b>
1 06 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Orang	9.000.000	<b>APBD</b>
<b>1 06 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya Administrasi Umum Dinas Sosial		1 Tahun	520.614.121	<b>APBD</b>
1 06 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<b>Jumlah Komponen Alat Listrik dan Elektronik</b>	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua	<b>36 Buah</b>	<b>2.475.770</b>	<b>APBD</b>

			Kelurahan			
1 06 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan dan Perlengkapan kantor	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Buah	62.012.280	<b>APBD</b>
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya bahan logistik kantor	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	147.639.200	<b>APBD</b>
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Jenis	12.363.780	<b>APBD</b>
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	296.123.091	<b>APBD</b>
1 06 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>102.866.360</b>	<b>APBD</b>

1 06 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya kendaraan dinas operasional	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 buah	39.600.000	<b>APBD</b>
1 06 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	63.266.360	<b>APBD</b>
<b>1 06 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Tahun	265.275.352	<b>APBD</b>
1 06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	2.103.200	APBD
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Listrik, Air dan Internet	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	81.941.100	<b>APBD</b>
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Pelayanan umum kantor	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan,	12 bulan	181.231.052	<b>APBD</b>

			Semua Kelurahan			
1 06 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	IKM		76,61	134.058.977	<b>APBD</b>
1 06 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	11.000.000	<b>APBD</b>
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	36.000.000	<b>APBD</b>
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	32.093.050	<b>APBD</b>
1 06 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	54.965.927	<b>APBD</b>

1 06 02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang tumbuh dan aktif melaksanakan usaha kesejahteraan sosial		9 lembaga	901.852.350	<b>APBD</b>
1 06 02 2.02	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	terlaksananya koordinasi dan kerjasama SKPD terkait pengumpulan sumbangan		1 Tahun	5.330.000	<b>APBD</b>
1 06 02 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya koordinasi antar SKPD tentang penerbitan izin pengumpulan uang atau sumbangan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	5.330.000	<b>APBD</b>
1 06 02 2.03	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tercapainya penanganan kesejahteraan sosial oleh PSKS			896.522.350	<b>APBD</b>
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang meningkat kemampuannya dan melaksanakan usaha kesejahteraan sosial	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 orang	91.827.900	<b>APBD</b>
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang meningkat kemampuannya dan melaksanakan usaha kesejahteraan sosial	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 orang	114.999.710	<b>APBD</b>

1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendamping PKH, Penyuluh Sosial dan Relawan Sosial lainnya yang meningkat kemampuannya dan melaksanakan usaha kesejahteraan sosial	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	236 orang	689.694.740	<b>APBD</b>
<b>1 06 04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Jumlah PMKS Penerima program pelayanan rehabilitasi sosial yang tertangani		80 orang	4.198.154.510	<b>APBD</b>
<b>1 06 04 2.01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	Terlaksananya pelayanan sosial yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Tuna Sosial, Orang Terlantar, Bekas Warga Binaan Perumahan (BWBP dan Anak Berhadapan dengan Hukum		1 Tahun	4.198.154.510	<b>APBD</b>
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas dan Lanjut usia terlantar	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3122 orang	3.863.400.000	<b>APBD</b>
1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Bekas Warga Binaan Perumahan ,Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Anakberhadapan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua	145 orang	252.254.710	<b>APBD</b>

		dengan Hukum dan Wanita Rawan SosialEkonomi	Kelurahan			
1 06 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) yang mendapat pelayanan rujukan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	122 orang	82.499.800	<b>APBD</b>
<b>1 06 05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Ptresentase PMKS penerima program pelayanan rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial			957.328.259	<b>APBD</b>
<b>1 06 05 2.01</b>	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	Terlaksananya jaminan sosial bagi anak-anak terlantar		50 anak	92.329.000	<b>APBD</b>
1 06 05 2.01 01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang di data	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 anak	31.185.000	<b>APBD</b>
1 06 05 2.01 02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapat pelayanan rujukan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 anak	29.749.000	<b>APBD</b>
1 06 05 2.01 03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapat pembinaan lanjut	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua	10 anak	31.395.000	<b>APBD</b>

			Kelurahan			
1 06 05 2.02	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terkelolanya data fakir miskin dan tercapainya pendampingan sosial bagi keluarga penerima manfaat		1 Tahun	864.999.259	<b>APBD</b>
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Dokumen	499.999.799	<b>APBD</b>
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pendamping Sosial Bantuan Pangan kecamatan (PSBPK) yang terampil dan kompeten	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 orang	247.170.550	<b>APBD</b>
1 06 05 2.02 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah pendampingan dan Pembinaan KPM KUBE dan UEP-P yang terampil dan kompeten	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 orang	117.828.910	<b>APBD</b>
1 06 06	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Jumlah warga terdampak bencana alam dan sosial, orang terlantar yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial		100 orang	715.686.780	<b>APBD</b>

1 06 06 2.01	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	Tercapainya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial		100 orang	715.686.780	<b>APBD</b>
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Tersedianya kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 dan 400 orang	595.016.780	<b>APBD</b>
1 06 06 2.01 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya tempat penampungan dan dapur umum bagi warga terdampak bencana	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	66.995.000	<b>APBD</b>
1 06 06 2.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah petugas pendampingan psikososial yang terlatih	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 orang	53.675.000	<b>APBD</b>
1 06 07	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang tumbuh dan aktif melaksanakan usaha kesejahteraan sosial		80 buah	126.201.484	<b>APBD</b>
1 06 07 2.01	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Tuntung Pandang		1 Tahun	126.201.484	<b>APBD</b>
1 06 07 2.01 01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana Taman makam pahlawan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua	1 Tahun	8.284.100	<b>APBD</b>

			Kelurahan			
1 06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Tuntung Pandang	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Lokasi	92.682.608	<b>APBD</b>
1 06 07 2.01 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tercapainya Taman Makam Pahlawan yang aman	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	25.234.776	<b>APBD</b>



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2021 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2021. Selain itu realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2021.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah Program, Kegiatan, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana program, kegiatan, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Pengukuran kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kesejahteraan Sosial yang Dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.

Pada Tahun 2021 Anggaran untuk pendukung Tugas Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 13.649.576.031,-. Terdapat 3 Program utama yang dilaksanakan Dinas Sosial dengan segala keterbatasan anggaran dan situasi pandemi covid-19 tahun 2021. Ketiga program tersebut adalah :

1. **Rehabilitasi sosial**, pada program ini sebagian besar merupakan program dan kegiatan yang mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi:
  - a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial;
  - b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial
  - c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial
  - d. Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial

2. **Pemberdayaan Sosial**, pada program ini lebih ditujukan untuk membangun partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial termasuk didalamnya meningkatkan kemampuan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Verifikasi dan validasi data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta pemberdayaan fakir miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
3. **Perlindungan dan Jaminan Sosial**, pada program ini dilaksanakan untuk memberikan perlindungan bagi keluarga fakir miskin melalui program PKH, Lanjut Usia dan Penyandang disabilitas serta anak terlantar agar dapat menjalankan fungsi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Perlindungan bagi korban terdampak bencana juga dilaksanakan melalui program perlindungan sosial yang merupakan amanat dari pelaksanaan SPM yaitu : *Perlindungan dan Jaminanan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/ Kota*

Selain ketiga program di atas Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut juga melaksanakan program Jaring Pengaman Sosial untuk menangani dampak covid-19 yang terjadi selama tahun 2021. Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial oleh Dinas Sosial dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai**

Jaring pengaman sosial diberikan untuk membantu keluarga miskin dan rentan serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Tanah Laut selama pandemi COVID19 dengan tujuan untuk meringankan beban mereka selama pandemi.

Arah kebijakan dalam rangka Pemberian Jaring Pengaman Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang terdampak sosial dan ekonomi selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah:

- a. Penanggulangan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat terutama masyarakat miskin akibat Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19 sesuai amanah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau stabilitas sistem keuangan.

- b. Pemberian Bantuan langsung Tunai bagi masyarakat terutama masyarakat miskin, lanjut usia dan penyandang disabilitas yang terdampak akibat Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19.
- c. Pemerintah Daerah hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka meminimalisir kekhawatiran atas dampak sosial dan ekonomi yang timbul selama Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19.

Ruang Lingkup penyaluran Jaring Pengaman Sosial berupa Bantuan Langsung Paket Pangan Bagi Masyarakat yang terdampak sosial dan ekonomi selama Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yaitu ahli waris korban covid yang meninggal dunia, lanjut usia dan penyandang disabilitas yang diusulkan oleh masing-masing desa dan kelurahan di Kabupaten Tanah Laut. Untuk ahli waris korban covid-19 yang meninggal dunia diberikan santunan berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yang dibayarkan melalui transfer rekening bank, sedang untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan dan dibayarkan sebanyak 4 (empat) bulan.

- a. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap I dan II dibayarkan secara bersamaan dimulai pada bulan September 2021 sedangkan tahap III dan IV dibayarkan mulai bulan Oktober 2021 dengan sasaran lanjut usia dan penyandang disabilitas diluar penerima BST dari Kementerian Sosial, PKH, BPNT dan BLT Dana Desa. Jumlah target penerima BLT APBD Tahap I dan II ini adalah sebanyak 4.731 KPM, dengan total anggaran sebesar Rp. 5.677.200.000,00,- yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/948-KUM/2021 tentang Penetapan Nama dan Alamat Penerima Santunan Bagi Korban Corona Virus Disease (Covid-19) Yang Meninggal Dunia dan Penerima Bantuan langsung Tunai (BLT) Bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.
- b. Pemberian santunan bagi ahli waris korban covid-19 yang meninggal dunia, dimulai pada bulan November 2021 dengan target sasaran sebanyak 90 KPM dengan besaran santunan sebesar Rp.5.000.000,00 per KPM. Total anggaran

santunan bagi korban covid yang meninggal dunia adalah sebesar Rp. 450.000.000,00.

Target dan realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Santunan bagi korban covid yang meninggal D dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**REALISASI PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) SANTUNAN BAGI KORBAN COVID-19**  
**TAHUN 2021 KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Uraian	Target (KPM)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Persentase	
				Anggaran	KPM	Anggaran	KPM
1	Bantuan Langsung Tunai bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	4.731	5.677.200.000,00	2.832.000.000,00	4.720	49,88 %	99,77 %
2	Santunan bagi korban Covid-19 yang meninggal dunia	90	450.000.000,00	280.000.000,00	56	62%	62%
<b>JUMLAH</b>							

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran Bantuan Langsung Tunai bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas terealisasi sebesar Rp.2.832.000.000,00 atau sekitar 49,88%. Rendahnya realisasi anggaran ini dikarenakan terdapat data penerima ganda atau terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lain seperti PKH, BPNT dan BST, selain itu terdapat juga penerima yang sudah meninggal dunia dan pindah alamat. Sedangkan realisasi santunan bagi korban covid yang meninggal dunia hanya tersalur kepada 56 KPM dari target 90 KPM dengan anggaran

yang terealisasi sebesar Rp.280.000.000,00 atau sekitar 62 %. Hal ini disebabkan ada sebagian ahli waris yang tidak melengkapi berkas yang sudah ditetapkan seperti surat keterangan ahli waris, surat keterangan meninggal dunia karena Covid-19 dan buku rekening yang masih aktif, selain itu juga ada sebagian yang sudah pindah alamat sehingga kesulitan untuk melengkapi berkas yang telah ditetapkan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan sekitar pelaksanaan BLT di Kabupaten Tanah Laut. Permasalahan tersebut adalah :

- a. Data yang tidak valid
- b. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sangat tinggi
- c. Sinkronisasi data penerima bantuan sosial tidak dilaksanakan secara optimal
- d. Adanya kecemburuan sosial yang tinggi di tengah masyarakat

Permasalahan diatas yang menyebabkan adanya penerima ganda, bantuan menjadi kurang tepat sasaran dan cenderung menimbulkan konflik ditengah masyarakat.

## **2. Sasaran RPJMD**

Setiap pembangunan, baik pembangunan nasional maupun daerah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun tidak semua pembangunan berdampak positif bagi masyarakat oleh karena itu pembangunan bukan hanya sekedar membangun fisik dan infrastruktur tapi pembangunan manusia seutuhnya harus menjadi perhatian yang serius sehingga masyarakat dapat merasakan makna dari pembangunan serta dapat menjaga kelestarian dari sebuah kemajuan untuk kehidupan yang lebih baik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan pembangunan dan modernisasi dapat memicu berbagai permasalahan sosial. Kualitas dan kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial cenderung meningkat. Angka kemiskinan relatif masih tinggi di tengah kemajuan dan era globalisasi, hal ini disebabkan berbagai faktor baik kapasitas masyarakat maupun ketidaksiapan dalam menghadapi kemajuan dan modernisasi. Meningkatnya kualitas kesehatan yang tidak dibarengi dengan meningkatnya kualitas

ekonomi masyarakat itupun berdampak pada keterlantaran lanjut usia dan penyandang disabilitas. Hal ini tentunya harus diantisipasi dengan terencana dan berkesinambungan.

Dalam rangka mengantisipasi permasalahan saat ini dan kedepan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut harus mampu mengembangkan inovasi agar pelayanan dan penanganan masalah yang dihadapi masyarakat dapat ditangani dengan lebih cepat, tepat dan manfaat.

Dinas Sosial merupakan SKPD yang melaksanakan Sasaran pada Misi ke 5 yaitu **“Membangun Sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”**, *Sasaran RPJMD : Meningkatnya perlindungan masyarakat*, dengan indikator :

1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi Mandiri
2. Ketersediaan Basis Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan (%)
3. Persentase PMKS yang tertangani
4. Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi lainnya.

Dengan demikian sasaran RPJMD yang menjadi core bussines Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam RPJMD dapat diuraikan pada pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Sasaran RPJMD, Target dan Capaian Tahun 2021**

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	2	3		4	5	6
1	<b>Meningkatnya perlindungan masyarakat</b>	1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi Mandiri	20 %	56,32 %	281,6 %
		2	Ketersediaan Basis Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan (%)	100 %	102,97 %	102,97 %

	3	Persentase PMKS yang tertangani	100 %	87,02%	87,02%
	4	Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi lainnya.	100 %	100 %	100 %

Beberapa hal yang dapat dijelaskan dari capaian kinerja tersebut di atas adalah **Indikator 1** : Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi Mandiri.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi salah satu sasaran strategis dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial tersebut. Menurut Permensos nomor : 8 tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial terdapat 26 jenis PMKS yang menjadi sasaran pembangunan kesejahteraan sosial, berikut adalah tabel rakapitulasi data PMKS di Kabupaten Tanah Laut tahun 2021.

**Rekapitulasi Data PMKS  
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021**

NO.	PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	KAB. TALA
1	Anak Balita Terlantar	0
2	Anak Terlantar	24
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	36
4	Anak Jalanan	-
5	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	-
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah	-
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-

8	Lanjut Usia Terlantar	12.646
9	Penyandang Disabilitas	3044
10	Tuna Susila	-
11	Gelandangan	-
12	Pengemis	-
13	Pemulung	-
14	Kelompok Minoritas	-
15	Bekas Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWLP)	124
16	orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	-
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	-
18	Korban Traffiking	-
19	Korban Tindak Kekerasan	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-
21	Korban Bencana Alam	48.252
22	Korban Bencana Sosial	4922
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-
24	Fakir Miskin (FM)	40.100
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	25
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-
	<b>TOTAL</b>	<b>109.173</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa ada peningkatan angka PMKS dari 45.090 jiwa pada tahun 2020 menjadi 109.173 jiwa pada tahun 2021 atau meningkat sekitar 242,12 %. Meningkatnya angka PMKS di Kabupaten Tanah Laut sangat dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Terjadinya bencana alam banjir pada awal tahun 2021 yang melanda hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan termasuk di Kabupaten Tanah Laut yang mengakibatkan meningkatnya warga terdampak bencana alam banjir.
2. Dampak pandemic covid-19 yang mengakibatkan roda perekonomian masyarakat menjadi terhambat, daya beli menurun dan aktifitas masyarakatpun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan apabila tidak segera ditangani maka tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan angka kemiskinan.

Dengan meningkatnya angka warga terdampak bencana dan warga terdampak covid-19 maka angka PMKS di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 telah meningkat secara signifikan. Namun demikian penanganan terhadap PMKS pada tahun 2021 telah dilaksanakan secara optimal, dari 109.173 PMKS telah ditangani sekitar 95.005 jiwa atau sekitar 87,02%, artinya terdapat sekitar 14.168 PMKS yang belum tertangani secara optimal. Dari 26 jenis PMKS tersebut di atas hanya sekitar 8 (delapan) jenis PMKS yang terdata dan menjadi sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yaitu :

**Jumlah PMKS yang dapat ditangani Dinas Sosial  
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021**

<b>No.</b>	<b>Jenis PMKS</b>	<b>Jumlah</b>
1	Anak Balita Terlantar	<b>0</b>
2	Anak Terlantar	<b>20</b>
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	<b>12</b>

4	Lanjut Usia Terlantar	<b>2.754</b>
5	Penyandang Disabilitas	<b>460</b>
6	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)	<b>47</b>
7	Korban Penyalahgunaan NAPZA	<b>0</b>
8	Korban Bencana Alam	<b>48.252</b>
9	Korban Bencana Sosial	<b>4877</b>
10	Fakir Miskin	<b>38.583</b>
<b>TOTAL</b>		<b>95.005</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 95.005 PMKS yang telah ditangani yang terdiri dari 8 (delapan) jenis PMKS yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dari 8 jenis PMKS yang paling banyak mendapat penanganan adalah Korban Bencana Alam yaitu sebesar 48.252 jiwa atau sekitar 50,79 % dan penanganan Fakir Miskin yaitu sebanyak 38.583 jiwa atau sekitar 40,61 %. Program penanganan fakir miskin ini masih lebih banyak diarahkan pada warga terdampak covid-19 sehingga program-program baik dari pusat seperti PKH, BPNT, dan BST. Sedangkan dari APBD Kabupaten Tanah Laut melaksanakan program BLT APBD dan Program Pemenuhan kebutuhan dasar berupa bantuan sosial terencana. Untuk mengukur PMKS yang menjadi mandiri setelah mendapat penanganan, terlebih dahulu ditetapkan indikator PMKS Mandiri yaitu sebagai berikut :

1. Dapat mengakses rumah sehat artinya setiap PMKS memiliki dan/atau menempati rumah sehat atau rumah yang layak huni
2. Dapat mengakses pangan 3 x sehari, artinya setiap PMKS dapat terpenuhi kebutuhan dasar pangannya untuk memenuhi makan sebanyak 3 x sehari.
3. Berpenghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimalnya, artinya PMKS memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal yang meliputi permakanan, pakaian, pendidikan dan kesehatannya.

4. Memiliki akses bagi anak usia sekolah artinya PMKS dapat menyekolahkan anak-anaknya
5. Memiliki akses kesehatan dasar, artinya PMKS memiliki jaminan kesehatan dan dapat mengakses lembaga penyelenggara layanan kesehatan.

Berdasarkan indicator tersebut, maka dapat dihitung dan ditetapkan PMKS yang menjadi mandiri setelah mendapat penanganan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Korban bencana alam sebanyak 48.252 orang
2. Bencana Sosial sebanyak 4877 orang
3. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 47 orang
4. Keluarga Penerima Program PKH sebanyak 339 orang

Jumlah seluruh PMKS yang menjadi Mandiri adalah sebanyak Jumlah 53.515 Jiwa.

Rumus :

% PMKS yang menjadi mandiri =

PMKS Mandiri	
PMKS yang ditangani	X 100 %

53.515	
95.005	X 100 %

**56,32%**

Berdasarkan uraian di atas bahwa capaian PMKS yang menjadi mandiri setelah ditangani telah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 20 % namun telah tercapai sebesar 56,32 % hal ini menunjukkan bahwa penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut telah dilaksanakan secara optimal. Namun demikian ada beberapa masalah

yang masih dihadapi dalam pelaksanaan penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut yaitu :

1. Data PMKS yang masih belum valid sehingga data yang disampaikan masih sering berubah-ubah.
2. Belum adanya system aplikasi data PMKS yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapat pelayanan dengan cepat dan tepat.
3. Masih tingginya program-program yang bersifat bantuan sosial dan masih rendah program-program yang memberdayakan masyarakat.
4. Belum adanya program penanganan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

**Indikator 2 : Ketersediaan Basis Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan (%)**

Data merupakan hal yang sangat penting sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Semakin valid dan akurat data PMKS dan Kemiskinan maka akan semakin kecil kemungkinan salah sasaran dalam penempatan program dan kegiatan. Dinas Sosial sebagai SKPD yang bertanggungjawab dalam pengelolaan data PMKS Kemiskinan telah berusaha untuk memenuhi target Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Kemiskinan yaitu 100 %. Namun target ketersediaan data terpadu kesejahteraan sosial kemiskinan dan PMKS belum dapat terpenuhi sesuai target. Pada tahun 2021 ketersediaan data kemiskinan dan PMKS yang valid dan akurat telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah terlaksana secara optimal. Tercapainya target ketersediaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tentunya didukung oleh semua pihak dan semakin mudahnya melaksanakan perbaikan data. Dukungan dan kemudahan tersebut meliputi :

- a. Perbaikan data dapat dilakukan setiap bulan.
- b. Setiap data yang terdapat dalam Data terpadu Kesejahteraan Sosial sangat berkaitan dengan program yang diturunkan oleh Kementerian Sosial sehingga perbaikan data sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
- c. Kesadaran aparat desa dalam perbaikan data semakin meningkat.

### **Indikator 3:** Persentase PMKS yang tertangani

Indikator ke 3 untuk memberikan perlindungan masyarakat adalah persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani. Hal ini berarti bahwa Dinas Sosial mempunyai kewajiban untuk menangani dan memberikan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Target penanganan masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2021 baru mencapai 87,02 %. Berikut disampaikan uraian PMKS yang dapat ditangani Dinas Sosial pada Tahun 2021 :

#### **Jumlah PMKS yang dapat ditangani Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021**

<b>No.</b>	<b>Jenis PMKS</b>	<b>Jumlah</b>
1	Anak Balita Terlantar	<b>0</b>
2	Anak Terlantar	<b>20</b>
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	<b>12</b>
4	Lanjut Usia Terlantar	<b>2.754</b>
5	Penyandang Disabilitas	<b>460</b>
6	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)	<b>47</b>
7	Korban Penyalahgunaan NAPZA	<b>0</b>
8	Korban Bencana Alam	<b>48.252</b>
9	Korban Bencana Sosial	<b>4877</b>
10	Fakir Miskin	<b>38.583</b>
<b>TOTAL</b>		<b>95.005</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 95.005 PMKS yang telah ditangani yang terdiri dari 8 (delapan) jenis PMKS yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dari 8 jenis PMKS yang paling banyak mendapat penanganan adalah Korban Bencana Alam yaitu sebesar 48.252 jiwa atau sekitar 50,79 % dan penanganan Fakir Miskin yaitu sebanyak 38.583 jiwa atau sekitar 40,61 %. Program penanganan fakir miskin ini masih lebih banyak diarahkan pada warga terdampak covid-19 sehingga program-program baik dari pusat seperti PKH, BPNT, dan BST. Sedangkan dari APBD Kabupaten

Tanah Laut melaksanakan program BLT APBD dan Program Pemenuhan kebutuhan dasar berupa bantuan sosial terencana.

**Indikator 4** : Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi lainnya. Target capaian dari indikator ke 4 adalah 100%, target ini dapat dicapai 100% melalui kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Pemberdayaan KPM PKH.

Kategori miskin untuk PMKS yang dapat diberikan Penanganan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial yaitu :

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar;
- b. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental;
- c. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal, dan terpencil);
- d. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumberdaya alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, listrik, dan air);
- e. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

### 3. Akuntabilitas Kinerja Kepala Dinas

#### Sasaran Eselon II (Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut)

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sasaran strategis sebagaimana sasaran pada Renstra Dinas Sosial Tahun 2018 – 2023 yang telah dirumuskan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang tertangani	100%	87,02%	87,02%

		Persentase PMKS yang menjadi Mandiri	10 %	56,32%	563,2%
--	--	--------------------------------------	------	--------	--------

**Sasaran : Meningkatnya penanganan masalah sosial bagi PMKS.**

**Indikator 1 : Persentase PMKS yang tertangani Berdasarkan tabel diatas dapat** dijelaskan bahwa untuk mengukur meningkatnya penanganan masalah sosial bagi PMKS yang menjadi sasaran Kepala Dinas Sosial dapat diukur dengan persentase PMKS yang mandiri. PMKS mandiri tentunya setelah mendapat penanganan permasalahan yang dihadapinya.

Target indikator yang harus dicapai oleh Kepala Dinas Sosial pada tahun 2021 adalah sebesar 100%, target ini masih belum tercapai secara optimal karena PMKS yang berhasil ditangani sebesar 87,02%% dengan capaian kinerja terhadap target sebesar 87,02%. Belum tercapainya target PMKS yang ditangani dikarenakan adanya situasi Pandemi covid-19. Adanya pandemi covid-19 ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi PMKS yang ditandai dengan menurunnya daya beli masyarakat, rendahnya penghasilan dari usaha yang dikembangkan, banyak usaha yang tidak dapat berkembang dengan baik. Secara sosial, situasi inipun mempengaruhi kemandirian PMKS. KPM yang sudah mendapat pelayanan dan penanganan masalah sosial masih kesulitan untuk dapat melaksanakan peran fungsinya di masyarakat.

Untuk menghitung PMKS yang ditangani dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{(\sum \text{PMKS yang mendapat pelayanan})}{\text{Jumlah Populasi PMKS Tahun (n)}} \times 100 \%$$

Jumlah PMKS tahun 2021 sebanyak 109.173 Jiwa, sedangkan PMKS yang tertangani atau yang mendapat pelayanan sosial pada tahun 2021 sebanyak 95.005 jiwa. Dengan demikian dapat dihitung persentase PMKS yang ditangani sebagai berikut :

$$\frac{(95.005)}{109.173} \times 100 \%$$

= 87,02%
----------

**Indikator 2:** Persentase PMKS yang menjadi Mandiri.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan fenomena umum di kota-kota yang semakin berkembang termasuk di Kabupaten Tanah Laut. PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan dan kesulitan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Untuk mengukur PMKS yang menjadi mandiri setelah mendapat penanganan, terlebih dahulu ditetapkan indicator PMKS Mandiri yaitu sebagai berikut :

1. Dapat mengakses rumah sehat artinya setiap PMKS memiliki dan/atau menempati rumah sehat atau rumah yang layak huni
2. Dapat mengakses pangan 3 x sehari, artinya setiap PMKS dapat terpenuhi kebutuhan dasar pangannya untuk memenuhi makan sebanyak 3 x sehari.
3. Berpenghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimalnya, artinya PMKS memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal yang meliputi permakanan, pakaian, pendidikan dan kesehatannya.
4. Memiliki akses bagi anak usia sekolah artinya PMKS dapat menyekolahkan anak-anaknya
5. Memiliki akses kesehatan dasar, artinya PMKS memiliki jaminan kesehatan dan dapat mengakses lembaga penyelenggara layanan kesehatan.

Berdasarkan indicator tersebut, maka dapat dihitung dan ditetapkan PMKS yang menjadi mandiri setelah mendapat penanganan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Korban bencana alam sebanyak 48.252 orang
2. Bencana Sosial sebanyak 4877 orang
3. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 47 orang
4. Keluarga Penerima Program PKH sebanyak 339 orang

Jumlah seluruh PMKS yang menjadi Mandiri adalah sebanyak 53.515 jiwa.

#### 4. Akuntabilitas Kinerja Sekretaris

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian serta ketatausahaan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	BB	BB	BB
		Nilai Hasil Evaluasi RB	BB	BB	BB
2	Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan Tepat Waktu	100%	100 %	100%
		Persentase pengelolaan Kepegawaian yang tertib	100%	100%	100%

Sesuai rencana strategis tahun 2019-2023 yang telah disusun Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja.

Nilai capaian sasaran dapat dinilai terhadap 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator sasaran yaitu :

**Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD**

**Indikator 1 : Nilai Hasil Evaluasi SAKIP**

## **Indikator 2 : Nilai Hasil Evaluasi RB**

Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu penguasa yang dipercaya mengelola sumber-sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan berbagai hal menyangkut fiskal, manajerial dan program.

Sesuai Inpres no 7 tahun 1999 Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Salah satu sasaran yang harus dicapai oleh sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD dengan demikian sekretaris Dinas Sosial memegang peranan yang sangat penting karena keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan Dinas Sosial menjadi tanggungjawab sekretaris.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai sasaran 1 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD, dapat diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu :

1. **Nilai hasil evaluasi SAKIP** yang ditargetkan mendapat nilai BB pada tahun 2021. Realisasi dari nilai hasil evaluasi SAKIP yang dicapai Dinas Sosial adalah BB sehingga kinerja Sekretaris Dinas Sosial dapat dikatakan telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
2. **Nilai Hasil Evaluasi RB**, Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen

merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Oleh karena itu nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi juga merupakan tolok ukur kinerja sekretaris dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial. Pada tahun 2021 target nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut BB. Target ini telah tercapai atau terealisasi, dengan demikian kinerja Sekretaris Dinas Sosial telah mencapai kinerja untuk sasaran 1 adalah 100% karena semua indikator yang ditetapkan sebelumnya telah mencapai target. Dengan demikian Sekretaris Dinas Sosial telah berhasil meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial.

**Sasaran 2** : Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran

**Indikator 1** : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan Tepat Waktu

**Indikator 2** : Persentase pengelolaan Kepegawaian yang tertib

Sasaran kedua yang harus dicapai oleh Sekretaris Dinas Sosial adalah meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan sistem administrasi dalam sebuah ruang lingkup kantor. Sistem manajemen dalam sebuah ruang lingkup perkantoran ini salah satu bagian dari manajemen yang memberikan informasi sesuai dengan bidang administrasi yang dibutuhkan untuk menunjang berjalannya suatu kegiatan secara efektif.

Untuk mengukur meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran yang menjadi tanggungjawab sekretaris, maka digunakan dua indikator yang pertama adalah indikator yang berkaitan dengan pelayanan yang baik dan tepat waktu. Pelayanan yang baik dapat diartikan bahwa sekretariat dapat menciptakan suasana kerja yang baik dan nyaman baik kepada seluruh karyawan maupun kepada masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan Dinas Sosial sedangkan pelayanan administrasi yang tepat waktu merupakan komitmen yang harus dijalankan agar seluruh kegiatan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pelayanan Administrasi perkantoran yang dapat diukur secara kuantitatif meliputi tertib administrasi surat menyurat, pencatatan aset dan penomoran

barang inventaris kantor serta pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor. Hal ini dapat menjadi tolok ukur meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif apabila seluruh komponen tersebut dapat terdokumentasi dengan baik sedangkan yang berkaitan dengan ketepatan waktu artinya sistem administrasi Dinas Sosial telah dijalankan secara efisien.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa Sekretaris Dinas Sosial mampu meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran secara efektif dan efisien karena telah mencapai target pertama yaitu 100% dan berhasil direalisasikan 100% juga. Demikian pula dengan indikator kedua yaitu pengelolaan kepegawaian yang tertib telah mencapai target 100%. Hal ini menunjukkan pengelolaan kepegawaian pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut tidak mengalami hambatan yang berarti. Kondisi ini dapat dilihat dari dokumen kepegawaian yang secara tertib terinventarisir dan didokumentasikan dengan baik sehingga tidak ada pegawai yang terhambat dalam kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala juga kewajiban serta kedisiplinan pegawai telah terkelola dengan relatif baik melalui absensi, SKP dan hal lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai di lingkungan Dinas Sosial.

#### 1) Akuntabilitas Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	Sasaran strategis	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Capaian
1	Melaksanakan Pengelolaan urusan kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi barang SKPD	42	42	100%
		Jumlah dokumen	2	2	100%

		Administrasi kepegawaian			
2	Melaksanakan Pengelolaan urusan umum SKPD	Jumlah jenis administrasi umum skpd	4	4	100%
		Jumlah jenis jasa administrasi penunjang Umum SKPD	12	12	100%
		Jumlah jenis barang pengadaan barang SKPD	4	4	100%
		Jumlah jenis administrasi pemeliharaan barang skpd	9	9	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbag Umum dan Kepegawaian melaksanakan 2 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian kinerja.

## 2). Akuntabilitas Kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan telah melaksanakan perjanjian kinerja dengan Sekretaris Dinas Sosial dengan target kinerja yang telah Akuntabilitas kinerja Kasubbag Perencanaan dan Keuangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	Sasaran strategis	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Capaian
----	-------------------	-------------------	--------	-----------	---------

<b>1</b>	Melaksanakan pengelolaan keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100 %</b>
<b>2</b>	Melaksanakan pengelolaan perencanaan dan pelaporan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>
		Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>
<b>3</b>	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	<b>80</b>	<b>76,63</b>	<b>95,78 %</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki 3 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja yang secara umum dapat dikatakan telah merealisasikan seluruh

indikator kinerja 100% sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan sebelumnya.

## **5. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial**

Bidang Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial melaksanakan kebijakan teknis rehabilitasi Jaminan Sosial Keluarga dan Perlindungan Sosial Korban Bencana. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial menangani beberapa jenis PMKS diantaranya yaitu Anak terlantar, Anak berhadapan dengan hukum (ABH), Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia terlantar, Tuna Sosial, Keluarga miskin penerima PKH dan Korban bencana alam dan bencana sosial.

Dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial menunjukkan pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial dengan sasaran strategis yang menjadi kinerja utama Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Selengkapny hasil capaian kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>1</b>	Meningkatnya PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial	Persentase PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial	100 %	<b>100%</b>	<b>100%</b>

<b>2</b>	Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		Persentase anak terlantar yang terpelihara	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>3</b>	Penanganan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sasaran strategis yang akan dicapai oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial adalah meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS.

Rehabilitasi Sosial Dasar merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan keberfungsian sosial PMKS, keluarga PMKS, dan masyarakat yang dilaksanakan di luar panti. Sedangkan PMKS yang menjadi sasaran rehabilitasi sosial dasar Tahun 2021 adalah Lanjut usia terlantar, anak terlantar, penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, orang terlantar, eks narapidana dan orang dengan gangguan jiwa serta korban bencana baik alam maupun sosial.

Oleh karena itu untuk mengukur meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS dapat diukur setidaknya dengan 4 (empat) indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut :

**1. Persentase PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial**

PMKS yang terampil dan mandiri menjadi indikator yang diperjanjikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial, ini merupakan indikator baru yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial karena pada tahun sebelumnya indikator tersebut tidak ada. PMKS yang terampil dan mandiri melalui program rehabilitasi sosial meliputi Penyandang Disabilitas dan eks narapidana. Jumlah Penyandang disabilitas yang mengikuti program keterampilan adalah sebanyak 40 orang dan eks narapidana sebanyak 47 orang. Penyandang disabilitas dan eks narapidana seluruhnya mampu mengikuti pelatihan keterampilan dan mengembangkan keterampilannya ditengah masyarakat.. Sehingga realisasi dari indikator yang diperjanjikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial telah mencapai target yaitu 100%.

**2. Persentase Lanjut usia dan Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**

Lanjut usia merupakan salah satu PMKS yang jumlahnya relatif banyak di Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2019 atau awal RPJMD jumlah lanjut usia miskin dan tidak mampu sebanyak 12.464 orang. Disatu sisi tingginya angka lanjut usia menunjukkan bahwa angka harapan hidup di Kabupaten Tanah laut relatif tinggi, program kesehatan boleh dikatakan berhasil sehingga banyak orang yang berumur relatif panjang. Namun panjangnya umur seseorang tidak dibarengi dengan meningkatnya keberhasilan ekonomi sehingga banyak lanjut usia yang hidup miskin serta kurang mampu mencukupi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan makan sehari-hari, rumah yang layak huni serta terhambatnya akses untuk mendapatkan layanan kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut maka pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia menjadi indikator keberhasilan capaian

sasaran Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah lanjut usia yang direncanakan terpenuhi kebutuhan dasarnya adalah sebanyak 2.754 orang. Lanjut usia yang direncanakan terpenuhi kebutuhan dasarnya seluruhnya dapat terealisasi dengan demikian capaian kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan Sosial dapat mencapai 100 %

Namun demikian apabila kita ukur dengan seluruh populasi lanjut usia di Kabupaten Tanah Laut persentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya baru mencapai 22,09% untuk pemenuhan kebutuhan pangan sedangkan untuk kebutuhan akses kesehatan telah mencapai 100% karena seluruh lanjut usia telah difasilitasi untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan melalui kepesertaan BPJS.

Masih tingginya angka lanjut usia yang belum tersentuh program pemenuhan kebutuhan dasar khususnya kebutuhan pangan dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Adanya pandemi covid 19 yang berkepanjangan sehingga semakin banyak lanjut usia yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Beberapa bantuan sosial yang disalurkan ternyata hanya mampu untuk bertahan hidup dan belum mampu untuk meningkatkan kualitas hidup para lanjut usia.
- b. Terbatasnya anggaran yang dapat digunakan untuk program pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia.
- c. Lemahnya ketahanan keluarga sehingga banyak lanjut usia yang terpaksa hidup sendiri dan tidak mendapat jaminan serta perlindungan dari keluarganya.
- d. Data Lanjut usia terlantar masih belum valid, sehingga masih berubah-ubah.

Tidak jauh berbeda dengan lanjut usia, penyandang disabilitas di Kabupaten Tanah Laut masih banyak yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar penyandang disabilitas meliputi : Tempat tinggal yang layak, kebutuhan makan sehari-hari, akses terhadap layanan

kesehatan dan akses terhadap pendidikan. Pada tahun 2020 penyandang disabilitas yang terdata sekitar 3044 orang sedangkan yang sudah mendapat layanan rehabilitasi sosial dasar baru mencapai 460 orang saja atau sekitar 15,11 %. Pada tahun 2021 Kepala bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial menargetkan 100% penyandang disabilitas akan terpenuhi kebutuhan dasarnya, namun target ini masih belum tercapai karena realisasinya baru mencapai 15,11 % untuk pemenuhan kebutuhan pangan sedangkan kebutuhan dasar kesehatan telah mencapai target 100%. Rendahnya realisasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Mayoritas penyandang disabilitas berasal dari keluarga miskin sehingga penyandang disabilitas tidak mengenyam pendidikan formal.
- b. Program pemenuhan kebutuhan dasar baru berorientasi pada pemenuhan kebutuhan permakanan padahal kebutuhan pakaian, kesehatan dan pendidikan juga perlu dianggarkan sehingga para penyandang disabilitas akan meningkat kualitas hidupnya.

### **3. Persentase anak terlantar yang terpelihara.**

Anak merupakan aset yang tak ternilai harganya, sehingga setiap anak harus terpenuhi kebutuhan dasarnya termasuk kebutuhan untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan Kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk anak sehingga mereka akan tumbuh dan berkembang dengan sehat dan akan menjadi seorang anak yang cerdas, termasuk anak terlantar dalam hal ini anak-anak dari keluarga miskin yang terhambat dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Diharapkan semua anak di Kabupaten Tanah Laut dapat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan sehingga mereka akan menjadi anak yang sehat dan berkualitas dimasa yang akan datang.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa anak terlantar yang terpelihara adalah anak yang mampu terpenuhi kebutuhan dasarnya termasuk kebutuhan untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Anak terlantar di Kabupaten Tanah Laut yang terdata pada tahun 2021 adalah sebanyak 24

orang. Dan seluruhnya telah mampu mengakses layanan pendidikan dan kesehatan serta terpenuhi kebutuhan dasarnya, dengan kata lain seluruh anak terlantar sudah terpelihara dengan baik. Dengan demikian relaisasi anak terlantar yang terpelihara telah terealisasi 100%.

#### **4. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial**

Seperti diketahui bahwa pada awal tahun 2021 telah terjadi bencana alam banjir yang melanda seluruh wilayah Kalimantan Selatan termasuk Kabupaten Tanah Laut. Selain bencana alam juga terjadi bencana sosial khususnya kebakaran rumah tempat tinggal dan bencana non alam yaitu pandemi covid-19 yang berkepanjangan. Semua bencana yang melanda warga masyarakat di Kabupaten Tanah Laut dapat ditangani secara optimal tentunya bukan hanya oleh Dinas Sosial tetapi juga dukungan semua pihak sehingga seluruh warga terdampak bencana dapat tertangani secara optimal.

Sesuai dengan perjanjian kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial yang menargetkan 100% korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.

#### **1) Akuntabilitas Kinerja Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial**

Akuntabilitas Kinerja kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini :

<b>N O</b>	<b>Sasaran strategis</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGE T</b>	<b>Realisa si</b>	<b>Capai an</b>
1	Memberikan/memfasilitasi pelatihan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar.	Jumlah anak terlantar yang mendapat pendidikan dan pelatihan	20	14	70 %
2	Memberikan/memfasilitasi pendidikan dan	Jumlah Penyandang		20	100%

	pelatihan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks trauma	disabilitas dan eks trauma yang mendapat pendidikan dan pelatihan kerja	20		
3	Melaksanakan pendampingan bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Balita terlantar	Jumlah anak berhadapan dengan hukum dan anak balita terlantar yang terlindungi hak nya setelah mendapat pendampingan sosial	15	<b>12</b>	<b>80 %</b>
4	Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi Eks Penyandang penyakit sosial	Jumlah Penyandang penyakit sosial yang terampil setelah mengikuti pelatihan keterampilan.	50	<b>20</b>	<b>40%</b>
5	Memfasilitasi penanganan orang dengan gangguan kejiwaan, orang terlantar dan mayat terlantar	Jumlah orang dengan gangguan kejiwaan, orang terlantar dan mayat terlantar yang ditangani	40	<b>27</b>	<b>67,5 %</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial melaksanakan 6 (enam) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran : Memberikan/memfasilitasi pelatihan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

Pada sasaran strategi memberikan/memfasilitasi pelatihan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial menetapkan target 20 orang anak terlantar yang diberikan pelatihan dan praktek belajar kerja, dari target tersebut hanya terealisasi 14 anak atau sekitar 70 % yang dapat mengikuti pelatihan keterampilan hal ini disebabkan j

karena ada 6 orang anak terlantar hasil seleksi untuk mengikuti pelatihan keterampilan ternyata mengundurkan diri karena telah bekerja membantu orang tuanya.

2. Sasaran : Memberikan/memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks trauma dengan indikator Jumlah Penyandang disabilitas dan eks trauma yang mendapat pendidikan dan pelatihan kerja, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial menetapkan 20 penyandang disabilitas untuk diberikan keterampilan, pada kegiatan ini telah tercapai 100 %.
3. Sasaran : Mendistribusikan bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Disabilitas. Pada sasaran ini diukur dengan indikator kinerja Jumlah Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Pada tahun 2021, jumlah penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya adalah sebanyak 460 KPM sesuai dengan target yang ditetapkan artinya Kepala Seksi Rehabilitasi sosial telah mencapai target kinerja dengan capaian 100%
4. Sasaran : Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi Eks Penyandang penyakit sosial. Pada sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan Anak Balita Terlantar yang terlindungi haknya setelah mendapat pendampingan sosial. Target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebanyak 15 anak berhadapan dengan hukum yang mendapatkan pendampingan

sosial, target ini dapat direalisasikan 12 ABH atau sekitar 80 %. Pendampingan sosial ini meliputi pendampingan pada saat pemeriksaan oleh aparat hukum, penyusunan BAP sampai pada sidang di pengadilan. Pasca sidang pendampingan sosial masih dilakukan untuk memastikan anak tidak mengalami trauma karena kasus yang dihadapi.

5. Sasaran Memfasilitasi penanganan orang dengan gangguan kejiwaan, orang terlantar dan mayat terlantar, Pada sasaran ini dapat diukur dengan indikator Jumlah orang dengan gangguan kejiwaan, orang terlantar dan mayat terlantar yang ditangani. Pada tahun 2021, Kepala seksi rehabilitasi sosial telah menangani 25 orang terlantar dan gangguan kejiwaan, 2 mayat terlantar sehingga total seluruhnya adalah 27 orang dari target 40 kasus dengan capaian kinerja 67,5 %.
6. Sasaran : Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi Eks Penyandang penyakit sosial. Pada sasaran ini dapat diukur dengan indikator Jumlah Penyandang penyakit sosial yang terampil setelah mengikuti pelatihan keterampilan. Penyandang penyakit sosial yang menjadi sasaran adalah eks narapidana. Target eks narapidana yang mengikuti pelatihan keterampilan sebanyak 50 namun yang bteralisasi sebanyak 20 orang dengan demikian hanya terealisasi 70%.

Jumlah anggaran yang dikelola oleh Kepala Seksi Rehbilitasi Sosial berjumlah Rp. 252.002.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 147.358.000,- atau sekitar 53,50%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 72,50%.

## 2) Akuntabilitas Kinerja Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Akuntabilitas Kinerja Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga dapat dilihat pada tabel berikut :

<b>NO</b>	<b>Sasaran strategis</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1	Mendistribusikan bantuan pemenuhan	Jumlah Penyandang Disabilitas	3122	<b>3122</b>	<b>100%</b>

	kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Terlantar	dan Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
2	Melaksanakan Pemeliharaan bagi Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang di Data Jumlah anak terlantar yang di kunjungi Jumlah anak terlantar yang di pantau	20 20 20	<b>20</b>	<b>100%</b>

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian kinerja Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga telah tercapai 100%. Pada indikator kinerja Jumlah Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target 3122 orang seluruhnya telah terealisasi secara optimal. Demikian halnya dengan indikator Jumlah Anak-Anak Terlantar yang di Data, Jumlah anak terlantar yang di kunjungi dan Jumlah anak terlantar yang di pantau dengan targert masing-masing 20 anak, seluruhnya dapat terealisasi secara optimal.

### 3) Akuntabilitas Kinerja Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

Akuntabilitas Kinerja Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana dapat dilihat pada tabel berikut :

<b>NO</b>	<b>Sasaran strategis</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1	Memfasilitasi tempat pengungsian bagi korban terdampak bencana	Jumlah korban terdampak bencana yang difasilitasi ketempat pengungsian	70	48252	>100 %
2	Menyiapkan dan mendistribusikan bantuan tanggap darurat/logistic bagi korban bencana alam dan bencana sosial	Jumlah Korban terdampak bencana yang mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar selama tanggap darurat	70	53.129	>100
3	Memfasilitasi pembinaan TAGANA dan Kampung Siaga Bencana (KSB)	Jumlah TAGANA dan KSB yang terampil dalam penanggulangan bencana	42	22	
4	Memfasilitasi Bantuan Sosial tidak terencana bagi Korban	Jumlah Korban bencana alam dan sosial yang mandiri setelah	400	400	100

	Bencana alam dan Bencana Sosial	mendapat bantuan sosial yang tidak terencana			
5	Memberikan pelayanan dukungan psikososial bagi korban bencana alam/sosial	Jumlah Korban Bencana alam/sosial yang mendapat dukungan psikososial	70	1.123	<b>&gt;100</b>

Memperhatikan tabel diatas, secara keseluruhan capaian kinerja Kepala Seksi Perlindungan Bencana telah melaksanakan penanganan masalah terhadap korban bencana alam maupun sosial secara optimal.

1. Pada sasaran Memfasilitasi tempat pengungsian bagi korban terdampak bencana dapat diukur dengan indikator Jumlah korban terdampak bencana yang difasilitasi ketempat pengungsian. Kepala Seksi Perlindungan sosial korban bencana telah menargetkan 70 orang, realisasi kinerja pada tahun 2021 telah melebihi target yaitu sebanyak 48.252 korban terdampak bencana telah difasilitasi ke tempat pengungsian. Seperti diketahui bersama pada awal Tahun 2021 telah terjadi bencana banjir di Kabupaten Tanah Laut. Penanganan masalah bagi korban terdampak banjir telah dilaksanakan secara optimal, dengan demikian realisasi kinerja pada indikator ini telah melebihi target lebih dari 100%.
2. Pada sasaran Menyiapkan dan mendistribusikan bantuan tanggap darurat/logistic bagi korban bencana alam dan bencana sosial dengan indikator Jumlah Korban terdampak bencana yang mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar selama tanggap darurat, juga telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 70 orang sedangkan realisasi pada tahun 2021 sebanyak 53.129 jiwa dengan rincian 48.252 korban bencana alam dan 4.877 jiwa korban bencana sosial. Dengan demikian pada

indikator ini kinerja Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana telah melebihi target yang ditetapkan lebih dari 100 %.

3. Pada sasaran Memfasilitasi pembinaan TAGANA dan Kampung Siaga Bencana (KSB) dengan indikator Jumlah TAGANA dan KSB yang terampil dalam penanggulangan bencana, masih belum mencapai target yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja. Dari target 40 TAGANA dan 2 KSB, baru terealisasi 21 orang TAGANA dan 1 KSB yang terampil dalam penanggulangan bencana, hal ini disebabkan terdapat 19 orang TAGANA yang tidak aktif dan 1 KSB yang masih dalam tahap pembinaan.
4. Pada sasaran Memfasilitasi Bantuan Sosial tidak terencana bagi Korban Bencana alam dan Bencana Sosial dengan indikator Jumlah Korban bencana alam dan sosial yang mandiri setelah mendapat bantuan sosial yang tidak terencana, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 400 KPM dan terealisasi 400 KPM atau 100 %.
5. Pada sasaran Memberikan pelayanan dukungan psikososial bagi korban bencana alam/sosial dengan indikator Jumlah Korban Bencana alam/sosial yang mendapat dukungan psikososial. Target pada indikator ini adalah sebanyak 70 orang, namun karena korban bencana alam maupun sosial pada tahun 2021 sangat banyak maka realisasi pendampingan psikososial bagi korban bencana alam maupun sosial telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1.123 orang yang terdiri dari korban bencana alam, seperti banjir, angin puting beliung dan abrasi air laut serta korban bencana sosial yaitu kebakaran rumah tempat tinggal. Dengan demikian kinerja Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana pada indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan yaitu lebih dari 100%.

Beberapa hal yang mempengaruhi naik turunnya capaian kinerja pada kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan bencana alam dan sosial bersifat insidental, jadi anggaran yang digunakan hanya untuk pembelian logistik pada saat terjadi bencana alam maupun sosial.

2. Penanganan bencana non alam seperti terjadinya Pandemi Covid-19 tidak menggunakan anggaran dari APBD murni yang ada pada Dinas Sosial tetapi menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
3. Bantuan sosial bagi korban bencana menggunakan dana bantuan tidak terencana yang anggarannya ada di BPKAD, Kepala seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana hanya memfasilitasi pengajuan Bansos tersebut.

Rendahnya serapan anggaran pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana tidak dibarengi dengan capaian realisasi fisik, karena realisasi fisik pada program dan kegiatan ini telah mencapai 100 %, lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian kinerja sebesar 75%. Artinya bahwa Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana telah melaksanakan efisiensi anggaran namun telah mencapai realisasi fisik yang maksimal dengan memanfaatkan sumber anggaran lain dengan optimal untuk melaksanakan penanganan dan pelayanan bagi korban bencana di Kabupaten Tanah laut pada Tahun 2021. Jadi apabila dirata-rata maka capaian fisik Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana telah mencapai lebih dari 100%

#### **6. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin**

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan fakir Miskin melaksanakan kebijakan teknis pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial, kepahlawanan dan kesetiakawanan serta kebijakan teknis penanganan fakir miskin. Bidang ini menangani PSKS yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (Orsos), Karang Taruna (KT), dan Penyuluh Sosial dan PMKS yaitu Fakir Miskin.

Dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menunjukkan pencapaian kinerja dengan sasaran strategis yang menjadi kinerja utama Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Selengkapnya hasil capaian kinerja Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	capaian
1	2	3	4		
1	Meningkatnya kemandirian PMKS penerima Program UEP KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	100%	1,99%	1,99%
2	Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih dan terampil dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial	75%	75%	100%
3	Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Koordinasi antar SKPD tentang Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Sumbangan	Cakupan penerbitan Izin pengumpulan uang atau sumbangan yang dikeluarkan	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Pengelolaan Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan	Ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan (%)	75%	75%	100%

Dari Tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa Kepala Bidang Pemberdayaan capaian kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dapat diuraikan pada masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

1. Kinerja utama pertama Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin adalah Meningkatkan kemandirian PMKS penerima Program UEP KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya, dapat diukur dengan indikator kinerja yaitu Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%). Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin tidak dapat mencapai target 100% sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja. Karena hanya terealisasi sekitar 1,99 %. Meningkatkan kualitas hidup fakir

miskin dapat dilihat dari keberfungsian sosial keluarga tersebut setelah mendapat bantuan sosial. Keberfungsian sosial dimaksud meliputi : mampu berperan dalam keluarga dan dalam kehidupan bermasyarakat, mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, mampu mengakses layanan pendidikan bagi anak-anaknya dan mampu mengakses layanan kesehatan. Rendahnya realisasi capaian kinerja ini dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pada masa pandemic angka kemiskinan terus meningkat, sehingga data kemiskinan menjadi tidak valid.
  - b. Program penanganan kemiskinan masih bersifat insidental dalam bentuk bantuan sosial belum terpadu dan berkesinambungan.
  - c. Keterbatasan anggaran untuk program-program penanganan fakirmiskin.
2. Kinerja utama kedua dari Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin adalah Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dengan indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih dan terampil dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial Pada indikator kinerja Sesuai dengan perjanjian kinerja yang diperjanjikan sebelumnya Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menetapkan target sebesar 75 % PSKS terlatih dan terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, hal ini dapat tercapai sehingga capaian kinerja pada indicator ini mencapai 100 %. Dari PSKS yang ada seperti PSM, TKSK dan relawan sosial lainnya dipandang mampu dan terampil dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut.
  3. Kinerja utama ketiga dari Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin adalah Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara Pada indikator kinerja Pada indicator ini dapat terealisasi 100%. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang mencerminkan penghargaan terhadap para pahlawan.

4. Kinerja utama keempat adalah Meningkatnya Koordinasi antar SKPD tentang Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Sumbangan dengan indicator Cakupan penerbitan Izin pengumpulan uang atau sumbangan yang dikeluarkan. Pengumpulan uang dan sumbangan dari masyarakat tentunya harus diatur sedemikian rupa dan perlu kerjasama beberapa pihak, oleh karena itu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin harus melaksanakan koordinasi dengan pihakterkait agar pengumpulan uang, sumbangan dari masyarakat dapat terlaksana dengan baik serta ada ijin yang dikeluarkan oleh lembaga perijinan di daerah. Pada indicator ini telah terealisasi 100%, sehingga penerbitan ijin pengumpulan uang dan sumbangan diharapkan dapat berjalan secara optimal.
5. Kinerja utama kelima adalah Meningkatnya Pengelolaan Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan dengan indikator Ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan (%). Data merupakan factor yang sangat penting, karena kesalahan data dapat mengakibatkan kesalahan yang sangat fat seperti program yang tidak tepat sasaran sehingga mengakibatkan pemborosan anggaran. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan Fakir Miskin menetapkan target 75 % dalam ketersediaan data kemiskinan, PMKS dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Verifikasi dan validasi data menjadi sangat penting hal ini untuk mendukung agar semua program kesejahteraan sosial dapat terlaksana secara optimal. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin telah mampu mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 75 % sehingga kinerjanya telah mencapai 100%.

**1) Akuntabilitas Kinerja Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas**

Akuntabilitas Kinerja Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Melaksanakan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Jumlah data fakir miskin dan data orang tidak mampu yang diverifikasi dan divalidasi	14000	12596	89,97%
2	Melaksanakan bimbingan dan pembinaan bagi petugas pendata dan operator data tingkat desa dan kecamatan	Jumlah operator data di desa dan di kecamatan yang terlatih dalam mengelola sistem informasi data	135	135	100 %
3	Mengelola Data PMKS	Jumlah PMKS yang diverifikasi dan di validasi	28000	95.005	339 %
4	Melaksanakan updating data secara berkala	Jumlah desa dan kelurahan yang melaksanakan updating data	135	135	100 %
5	Melaksanakan evaluasi pemanfaatan data	Jumlah pemanfaatan DTKS oleh Instansi terkait	10	7	70 %

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mengampu 5 (lima indicator kinerja) yang meliputi :

1. Jumlah data fakir miskin dan data orang tidak mampu yang diverifikasi dan divalidasi, pada indicator ini Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas menetapkan target sebanyak 14.000 keluarga fakir miskin yang diverifikasi dan divalidasi sedangkan realisasinya baru mencapai 12.596 atau sekitar 89,97 %. Realisasi ini masih belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi dan keterbatasan petugas yang melaksanakan verifikasi serta validasi data.
2. Jumlah operator data di desa dan di kecamatan yang terlatih dalam mengelola sistem informasi data. Jumlah operator data di desa dan kelurahan seluruhnya sebanyak 135 orang artinya setiap desa dan kelurahan memiliki 1 orang operator data yang bertugas untuk mengupdate data, baik data PMKS maupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Pada indicator ini Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas telah mencapai target yang ditetapkan

dalam perjanjian kinerja yaitu 135 orang operator data yang mengelola system informasi data dengan demikian kinerja seksi ini mencapai 100%.

3. Jumlah PMKS yang diverifikasi dan di validasi, pada indicator ini Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas menetapkan target sebanyak 28.000 PMKS yang diverifikasi dan divalidasi, realisasi pada indicator ini telah melebihi target yang ditetapkan atau melebihi 100 % karena telah mampu memverifikasi dan validasi sebanyak 95.005 PMKS.
4. Jumlah desa dan kelurahan yang melaksanakan updating data, Jumlah desa di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 130 desa sedangkan kelurahan sebanyak 5 kelurahan. Seluruh desa dan kelurahan telah mengupdate data baik data kemiskinan, PMKS maupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga capaian kinerja pada indicator ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja yaitu 100%.
5. Jumlah pemanfaatan DTKS oleh Instansi terkait, Pengelolaan data menjadi sangat penting dan menunjukkan manfaat dari data yang dikelola. Pengelolaan data meliputi pemanfaatan data dalam pelaksanaan program penanganan masalah kesejahteraan sosial. Dari 10 jenis program yang ditargetkan dalam pemanfaatan data baru tercapai 7 program yang memanfaatkan data PMKS dan data DTKS, yaitu PKH, BPNT, BST, BLT-DD,, subsidi listrik, kepesertaan BPJS dan Kartu Indonesia Pintar. Sehingga capaian kinerja pada indicator ini baru mencapai 70 %.

## **2) Akuntabilitas Kinerja Kepala Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan**

Akuntabilitas Kinerja Kepala Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Memfasilitasi Bantuan Stimulant dan Pendampingan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) KUBE bagi keluarga Fakir miskin	Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang mandiri setelah diberikan bantuan stimulant UEP KUBE	40	40	100%
2	Melaksanakan pembinaan pendamping Sosial Bantuan Pangan Kecamatan	Jumlah Pendamping Sosial Bantuan Pangan Kecamatan yang terampil dan kompeten	12	12	100%
3	Melaksanakan pembinaan Pendamping UEP KUBE	Jumlah Pendamping UEP KUBE yang terampil dan kompeten	12	12	100%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Kepala Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan mengampu 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan. Jumlah anggaran yang dikelola oleh Kepala Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan berjumlah Rp. 117,828.910,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 93.757.130,- atau sekitar 79,57%. Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kepala Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan dilihat dari serapan anggaran berkatagori TINGGI karena mencapai 79,57% Demikian juga dengan realisasi fisik kegiatan masuk dalam katagori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan telah melaksanakan kegiatan secara optimal.

#### **1) Akuntabilitas Kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial**

Akuntabilitas Kinerja Kepala Seksi Akuntabilitas Kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial dilihat pada tabel berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	Jumlah PSM Yang Terampil	22	22	100%
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah TKSK yang Terampil	11	11	100%
3	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Penyuluh Sosial, Pendamping PKH, Petugas SLRT, KT, dan Orsos yang Terampil	138	138	100%
4	Melaksanakan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	2	2	100%
5	Melaksanakan Koordinasi Koordinasi antar SKPD tentang Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Sumbangan	Jumlah Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau sumbangan yang dikeluarkan	20	10	50%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Kepala Seksi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial mengampu 2 (dua) Program dan 3 (tiga) Kegiatan.

Jumlah anggaran seluruhnya yang dikelola oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial berjumlah Rp. 1.603.437.280 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 788.724.519,- atau sekitar 49,18%. Adapun rata-rata realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 90 %.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial dilihat dari serapan anggaran berkategori RENDAH karena mencapai 49,18% Sedangkan realisasi fisik kegiatan masuk dalam katagori TINGGI karena mencapai 90%. Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas

kinerja Kepala Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial perlu ditingkatkan dimasa yang akan datang.

## B. Akuntabilitas Keuangan

### 1. Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di tahun 2021, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut melaksanakan 6 Program 14 kegiatan dan 45 sub kegiatan. Pada tabel berikut akan digambarkan tentang anggaran dan realisasi APBD Dinas Sosial Tahun 2021.

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi	
					Keuangan (%)	Fisik (%)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.214.640	298.742.500	81,72	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.541.194.048		73,76	100%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.377.000	25.500.000,-	45,23	100%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	569.168.121	415.446.395	80,19	100%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.149.730	85.970.000	84,99	100%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	266.775.352	227.637.508	85,59	100%

		Pemerintahan Daerah				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.058.977	112.276.610	<b>83,75</b>	<b>100%</b>
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.330.000	4.700.000	<b>74,31</b>	<b>100%</b>
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	768.176.770	666.204.735	<b>67,52</b>	<b>80%</b>
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4.198.154.510			<b>100%</b>
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	92.329.000	1.365.000	<b>1,48</b>	<b>25%</b>
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	849.011.090	691.988.700	<b>80,00</b>	<b>100%</b>
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	664.037.090	141.876.500	<b>65,13</b>	<b>100%</b>
6	PROGRAM PENGELOLAAN	Pemeliharaan Taman Makam	119.298.684	117.819.784	<b>93,36</b>	<b>100%</b>

	TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				
--	----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

## 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Telah disampaikan sebelumnya bahwa pada tahun 2021 Dinas Sosial mengampu 6 Program sebagai alat untuk mencapai sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Sasaran Strategis Dinas Sosial meliputi 9 Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya penanganan masalah sosial bagi PMKS
2. Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Meningkatnya Pemberdayaan PMKS
4. Meningkatnya Ketersediaan Basis Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan yang akurat.
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS
6. Meningkatnya kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
7. Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa
8. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD
9. Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran

Sedangkan 6 program tersebut meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Terkait dengan anggaran dan realisasi dari masing-masing sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2021	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Meningkatnya penanganan masalah sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	100%	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kot a</li> <li>- Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kot a</li> </ul>	<p>Rp.5.330.000</p> <p>Rp. 896.522.350</p>	<p>Rp. 4.700.000</p> <p>Rp. 666.204.735</p>
				<b>Program Perlindungan Jaminan Sosial</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a</li> </ul>	Rp. 864.999.259	Rp. 141.876.500
				<b>Program Rehabilitasi Sosial</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</li> </ul>	Rp. 4.080.539.510	Rp.

				<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</li> </ul> <b>Program Penanganan Bencana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota</li> </ul>	Rp. 92.329.000  Rp. 1.201.584.930	Rp. 1.365.000  Rp. 141.876.500
2	Menurunnya Angka PMKS	Persentase menurunnya PMKS	20%	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	Rp.5.330.000  Rp. 896.522.350	Rp. 4.700.000  Rp. 666.204.735
				<b>Program Perlindungan Jaminan Sosial</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	Rp. 864.999.259	Rp. 141.876.500
				<b>Program Rehabilitasi Sosial</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia</li> </ul>	Rp. 4.080.539.510	

				<p>Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</p> <p><b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</li> </ul> <p><b>Program Penanganan Bencana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota</li> </ul>	<p>Rp. 92.329.000</p> <p>Rp. 1.201.584.930</p>	<p>Rp. 1.365.000</p> <p>Rp. 141.876.500</p>
3	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS	Persentase Keluarga Miskin yang meningkat kualitas hidupnya		<p><b>Program Perlindungan Jaminan Sosial</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul> <p><b>Program Rehabilitasi Sosial</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</li> </ul> <p><b>Program Pemberdayaan Sosial</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Potensi Sumber</li> </ul>	<p>Rp. 864.999.259</p> <p>Rp. 4.080.539.510</p> <p>Rp. 896.522.350</p>	<p>Rp. 691.988.700</p> <p>Rp.</p> <p>Rp.</p>

				Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		666.204.735
4	Meningkatnya ketersediaan Basis Data Terpadu (BDT) PMKS dan Kemiskinan yang akurat	Persentase data PMKS dan kemiskinan yang terverifikasi dan tervalidasi		<b>Program Perlindungan Jaminan Sosial</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	Rp. 864.999.259	Rp. 691.988.700
5	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS	Persentase Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		<b>Program Rehabilitasi Sosial</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</li> </ul>	Rp. 4.080.539.510	Rp.
		Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		<b>Program Rehabilitasi Sosial</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</li> </ul>	Rp. 4.080.539.510	Rp.
		Persentase anak terlantar yang mampu mengakses layanan		<b>Program Perlindungan Jaminan Sosial</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan Anak-anak terlantar</li> </ul>	Rp. 92.329.000,-	Rp. 1.365.000

		pendidikan dan kesehatan				
		Persentase anak berhadapan dengan hukum yang mendapat pendampingan sosial		<b>Program Rehabilitasi Sosial</b> - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 4.080.539.510	
		Persentase orang terlanjar, eks narapidana dan ODGJ yang ditangani		<b>Program Rehabilitasi Sosial</b> - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 4.080.539.510	
6	Meningkatnya kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		<b>Program Pemberdayaan Sosial</b> - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 896.522.350	Rp. 666.204.735
7	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setekah masa tanggap		<b>Program penanganan Bencana</b> - Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Rp. 1.201.584.930,-	

		darurat bencana				
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai Evaluasi SAKIP		<b>Program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</li> <li>- Administrasi keuangan perangkat daerah</li> </ul>	Rp. 99.214.640,-	Rp. 60.922.000  Rp.
		Nilai Hasil Evaluasi RB		<b>Program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li> <li>- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kabupaten/kota</li> <li>- Pengadaan Barang Milik Daerah Kabupate/kota</li> <li>- Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</li> <li>- Administrasi keuangan</li> </ul>	Rp. 569.168.121,-  Rp. 56.377.000,-  Rp. 134.058.977,-  Rp. 97.666.360,-  Rp. 99.214.640,-	Rp. 415.446.395  Rp. 25.500.000  Rp. 112.276.610  Rp. 85.970.000  Rp. 60.922.000

				perangkat daerah	Rp. 5.541.194.048	Rp.
9	Meningkatnya kelancaran Administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan tepat waktu		<b>Program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li> <li>- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kabupaten/kota</li> <li>- Pengadaan Barang Milik Daerah Kabupate/kota</li> </ul>	Rp. 569.168.121,-  Rp. 56.377.000,-  Rp. 134.058.977,-  Rp. 97.666.360,-	Rp. 415.446.395  Rp. 25.500.000  Rp. 112.276.610  Rp. 85.970.000
		Persentase pengelolaan kepegawaian yang tertib		<b>Program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li> </ul>	Rp. 56.377.000,-	Rp. 25.500.000

